

## Belanja Modal- Penampakan Proyek Irigasi Rp. 800 Juta di Bone Diduga Asal Jadi, Jalan Tani Juga Rusak !



Sumber gambar:

<https://batarapos.com/penampakan-proyek-irigasi-rp-800-juta-di-bone-diduga-asal-jadi-jalan-tani-juga-rusak/>

Proyek rehabilitasi jaringan irigasi D.I Lawara di Desa Barugae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan diduga asal jadi.

Pasalnya, campuran semen dan pasir pada pemasangan batu yang mulai dikerjakan pada bulan April 2024 lalu nampak kropos, saat diremas, campuran semen pasir hancur.

Sejumlah titik pemasangan batu juga tampak mengalami keretakan, tidak hanya itu, proyek ini juga sebagian masih menggunakan batu mengandung kapur.

Amir selaku UPT PSDA wilayah Bengo berdalih, bahwa hanya sebagian kecil yang rusak lantaran menggunakan sistem manual.

” Itu hanya sebagian saja yang rusak, campurannya manual jadi biasa tidak merata adonanya, tidak digali juga pemasangan batunya, hanya mengikuti bekas pemasangan batu lama,” dalihnya.

Soal batu yang diduga mengandung kapur atau batu kropos yang digunakan, Amir menampik, menurutnya, pihak subkon telah diberitahu untuk tidak menggunakan batu tersebut, namun faktanya, masih terdapat pemasangan batu yang masih menggunakan batu tersebut.

” Itu baru selesai diplaster tiba-tiba hujan tadi makanya rusak, saya sudah sampaikan pekerja untuk membeli terpal supaya ditutup, kalau batu, Sudah memang disampaikan pemborongnya sama Dinas, batu yang tidak bagus jangan dipasang,” Kata Amir.

Diketahui, Proyek rehabilitasi irigasi ini dikelola oleh CV Fatimah, yang bersumber dari DAK tahun anggaran 2024, nomor kontrak 611/02-Kontrak/DAK-DSDABK/III/2024 dengan nilai kontrak Rp. 805.104.950

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Pekerjaan proyek ini juga dikeluhkan masyarakat lantaran aktivitas antar muat material membuat jalan tani rusak parah.

Jalan tani yang sebelumnya bisa dilalui motor, saat ini masyarakat hanya bisa jalan kaki menuju sawah dan kebun mereka, akibat jalan yang sudah seperti kubangan.

Warga mengaku siap bergotong royong memperbaiki jalan rusak tersebut jika materialnya disediakan pihak kontraktor.

” Kalau sudah ada materialnya kita siap perbaiki sendiri,” Tuturnya.

Terpisah, Kepala Desa Barugae, Subarding mengaku tak bisa berbuat apa-apa terkait rusaknya jalan tani tersebut.

” Itu belum pengerasan, seandainya sudah pengerasan pasti kami sudah larang melintas,” tegas Subarding, saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa 2 juli 2024.

Sabarding juga mengaku sangat prihatin melihat kondisi jalan tani diwilayahnya rusak seperti itu, namun disisi lain kata Kades Barugae, tanpa pembangunan irigasi tersebut warganya yang mayoritas petani akan terancam gagal panen.

” Itulah dilemanya kita sebagai pemerintah Desa, karena bukan kewenangan kita, namun lebih bagusnya dua-duanya jalan, artinya kebutuhan air petani terpenuhi, jalan tani masyarakat juga layak diakses,” Harapnya.

Kades Barugae mengaku, proyek rehabilitasi jaringan irigasi tersebut merupakan usulan pemerintah Desa dua tahun yang lalu, namun baru terealisasikan di tahun 2024 ini.

” Ini usulan dua tahun yang lalu, pak ketua DPRD itu kemarin,” Katanya.

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

*Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa*

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

### 3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

#### Sumber Berita:

1. <https://batarapos.com/penampakan-proyek-irigasi-rp-800-juta-di-bone-diduga-asal-jadi-jalan-tani-juga-rusak/>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

#### Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.